

**STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DESA DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN
(Studi Di Desa Batahan Kecamatan Kotanopan Kabupaten
Mandailing Natal)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

AFRIZAL FAHLEVI LUBIS
1303110085

Program Studi Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Hubungan Masyarakat



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **AFRIZAL FAHLEVI LUBIS**
N P M : **1303110085**
Program Study : **Ilmu Komunikasi**
Judul Skripsi : **STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DESA
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN (Studi Di Desa Batahan Kecamatan Kotanopan
Kabupaten Mandailing Natal)**

Medan, 11 Oktober 2018

Pembimbing I


Dr. Arifin Saleh S.Sos, M.Sp

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



Nurhasanah Nasution S.Sos, M.I.Kom



Dekan


Dr. Arifin Saleh S.Sos, M.Sp

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **AFRIZAL FAHLEVI LUBIS**
N P M : **1303110085**
Program Study : **Ilmu Komunikasi**
Pada hari, tanggal : **Kamis, 11 Oktober 2018**
W a k t u : **Pukul 08.30 WIB s/d selesai/Lab FISIP UMSU**

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. Leylia Khairani, M.Si** (.....)
PENGUJI II : **Muhammad Said Hrp, S.Sos, M.I.Kom** (.....)
PENGUJI III : **Dr. Arifin Saleh S.Sos, M.Sp** (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua,


Dr. Arifin Saleh S.Sos, M.Sp



Sekretaris,


Drs. Zulfahmi M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **AFRIZAL FAHLEVI LUBIS. NPM 1303110085**, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa melakukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat, atau menjiplak, atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat maupun karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 02 Oktober 2018

METERAI
TEMPEL
TGL 20
17559AFF491107673
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yang Menyatakan



AFRIZAL FAHLEVI LUBIS



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Dasar Terpercaya
Surat ini agar disebutkan
panggilannya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **AFRIAL FAHLEVI LUBIS**
NPM : **1303110005**
Jurusan : **FISIP- Ilmu Komunikasi / konsentrasi Humas.**
Judul Skripsi : **Strategi Komunikasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Di Desa Batahan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	19/04-2018	Bimbingan / Sharing Judul dan latar belakang	<i>[Signature]</i>
2.	30/04-2018	Bimbingan latar belakang, rumusan masalah dan uraian teoritis	<i>[Signature]</i>
3.	7/05-2018	Bimbingan latar belakang, rumusan masalah dan uraian teoritis.	<i>[Signature]</i>
4.	27/07-2018	Bimbingan Sempro /mengerahkan undangan sempro	<i>[Signature]</i>
5.	08/08-2018	Bimbingan Revisi setelah seminar proposal	<i>[Signature]</i>
6.	10/08-2018	Bimbingan daftar panduan wawancara	<i>[Signature]</i>
7.	10/09-2018	Bimbingan keseluruhan Bab 2 dan metodologi Penelitian	<i>[Signature]</i>
8.	21/09-2018	Bimbingan hasil wawancara dan pembahasan	<i>[Signature]</i>
9.	26/09-2018	Bimbingan hasil wawancara dan pembahasan dan saran juga kesimpulan.	<i>[Signature]</i>
10	3/10/18	ACC Meja Kerja	<i>[Signature]</i>

Medan,20.....

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke :

[Signature]
.....
(Dr. Arifin Saleh, MSP.)

[Signature]
.....
(Nurhasanah Nasution)

[Signature]
.....
(Dr. Arifin Saleh, MSP.)

ABSTRAK
STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DESA DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN
(Studi Di Desa Batahan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing
Natal)
AFRIZAL FAHLEVI LUBIS
1303110085

Desa Batahan yang terletak di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal adalah sebuah desa terpencil yang jarak dan akses jalannya kurang lebih 20 kilometer dari Kota Kotanopan. Akses jalan untuk masuk ke desa ini sangat sulit untuk dikendarai dan dilewati, dikarenakan hal tersebut maka Pemerintahan Desa mengadakan pembangunan Desa agar menjadi lebih baik lagi. Strategi komunikasi dalam pembangunan sangat diperlukan untuk menciptakan perubahan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat, memerlukan sistem organisasi khusus yang menyalurkan suatu rencana yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan secara signifikan. Dalam penyelenggaraan pembangunan, diperlukan suatu sistem komunikasi agar terjalin komunikasi yang efektif dan memiliki makna yang mampu mengarahkan pencapaian tujuan pembangunan. Hal itu perlu sekali dilakukan karena proses pembangunan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Komunikasi pembangunan ini harus mengedepankan sikap aspiratif, konsultatif dan relationship. Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dan perumusan masalah dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu, untuk mendeskripsikan Strategi Komunikasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Batahan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Teori yang dipakai pada penelitian ini adalah Komunikasi, Strategi, Strategi Komunikasi, Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, Konsep Pemerintahan Desa dan Konsep Pembangunan Desa. Jenis penelitian yang dipakai penulis untuk riset penelitian skripsinya adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai peristiwa realitas yang tengah terjadi di masyarakat, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun peristiwa tertentu. Strategi Komunikasi yang dilakukan Pemerintahan Desa Batahan dalam proses pembangunan akses jalan adalah dengan melakukan sosialisasi kerumah-rumah masyarakat Desa Batahan untuk memberikan informasi seputar pembangunan akses jalan, mengadakan musyawarah di Balai Desa, menerima saran dan kritik dari masyarakat, memasang spanduk-spanduk dipinggir jalan dan sekitar perumahan masyarakat Desa Batahan serta ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan dengan masyarakat Desa Batahan.

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Partisipasi Masyarakat dan Pemerintahan Desa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan Rahmad dan Karunia Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Strategi Komunikasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. (Studi Di Desa Batahan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)”**.

Ucapan terima kasih terdalam peneliti persembahkan kepada kedua orang tua saya, **Ayahanda saya Alm. Parluhutan Lubis & Ibunda saya Amnasari Nadeak, serta Saudara Kandung saya Yusuf Affandi Lubis, Khoirun Fadillah Lubis dan Faiz Noor,** yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan perkuliahan selama ini. Terima kasih banyak telah memberikan banyak nasehat, dukungan moral, dukungan materil serta doa yang tidak putus-putusnya kepada saya serta selalu mensupport saya hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi saya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, nasihat serta dukungan dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Bapak Dr. Rudianto S.Sos M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Arifin Shaleh, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Drs. Zulfahmi M.I.Kom.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Abrar Adhani M.I.Kom.
6. Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Ibu Nurhasanah Nasution, M.I.Kom.
7. Bapak Dr. Arifin Shaleh selaku Dosen pembimbing saya yang juga telah begitu banyak memberikan masukan, waktu, tenaga, pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada tempat penelitian saya Kantor Pemerintahan Desa Batahan, kepala, pegawai dan masyarakatnya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk informasi dan meluangkan waktu untuk saya melakukan riset penelitian.
9. Kepada etek saya Anidawati Nadeak, Bou saya Faisah, Nantulang dan Tulang saya semuanya. Terima kasih karena selalu membantu saya dan mensupport saya untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi saya.
10. Kepada Sahabat-sahabat saya Ilham Syukri Daulay dan Irma Syahrina. Terima kasih karena telah selalu mendampingi saya dalam proses perkuliahan

dan pengerjaan skripsi ini, memberikan support yang teramat sangat serta selalu membantu saya

11. Dan yang terakhir, Terima Kasih untuk semua orang (tidak dapat penulis sebutkan satu persatu) yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini dan telah banyak memberikan informasi kepada penulis dalam segala hal.

Medan, 02 Oktober 2018

Penulis :

Afrizal Fahlevi Lubis

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN.....	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II URAIAN TEORITIS.....	10
A. Komunikasi.....	10
1. Pengertian Komunikasi.....	10
2. Unsur-Unsur Komunikasi.....	15
3. Fungsi Komunikasi.....	16
4. Proses Komunikasi.....	18
5. Hambatan Komunikasi.....	20
B. Strategi.....	21
1. Pengertian Strategi.....	21
2. Tingkat-Tingkat Strategi.....	23
C. Strategi Komunikasi.....	26
1. Pengertian Strategi Komunikasi.....	26
2. Langkah-langkah Strategi Komunikasi.....	27
3. Tujuan Strategi Komunikasi.....	29
4. Prinsip-Prinsip Strategi Komunikasi.....	29
D. Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.....	30
E. Konsep Pemerintahan Desa.....	31
F. Konsep Pembangunan Desa.....	38

BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Metode Penelitian.....	48
1. Jenis Penelitian.....	48
2. Kerangka Konsep.....	49
3. Defenisi Konsep.....	50
4. Kategorisasi Penelitian.....	52
5. Narasumber Penelitian.....	53
6. Teknik Pengumpulan Data.....	53
7. Teknik Analisis Data.....	54
8. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	55
a. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	55
b. Sejarah Kota Kabupaten Mandailing Natal.....	55
c. Visi Dan Misi Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Kotanopan, Desa Betahan.....	58
d. Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Batahan.....	59
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 60
A. Penyajian Data.....	60
B. Hasil Penelitian.....	61
B.1. Strategi Komunikasi Pemerintahan Desa.....	61
B.2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.....	64
C. Pembahasan Data.....	66
 BAB V PENUTUP.....	 70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	74
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat pedesaan hidup dengan berbagai latar belakang tradisi dan memiliki nilai-nilai sosial tertentu yang berbeda satu sama lain. Untuk membangun dan mengembangkan sebuah desa, Tentu saja hal ini merupakan tantangan pelaku pembangunan nasional dalam upaya membangun masyarakat secara menyeluruh tanpa menimbulkan jurang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Bagi pembangunan sebuah desa, komunikasi dan kerjasama yang baik adalah pondasi utama dalam sebuah pembangunan. Bagaimana sebuah komunikasi yang baik akan menghasilkan kerjasama yang baik pula.

Komunikasi akan berhasil apabila pikiran disampaikan dengan perasaan yang disadari, sebaliknya komunikasi akan gagal apabila sewaktu menyampaikan pikiran, perasaan tidak terkontrol. Pikiran bersama perasaan yang akan disampaikan kepada orang lain dinamakan *picture in our head*. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana caranya agar gambaran dalam benak dan isi kesadaran pada komunikator . Pesan itu dapat dimengerti, diterima, dan bahkan dilakukan atau diterapkan oleh komunikan.

Tujuan komunikasi pembangunan bukanlah sekedar memasyarakatkan pembangunan dan penyampaian pesan-pesan pembangunan saja, tetapi yang lebih penting dari dari itu adalah menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara partisipasi-partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan kata lain,

komunikasi pembangunan merupakan cara yang harus ditempuh untuk membangkitkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Desa Batahan yang terletak di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal adalah sebuah desa terpencil yang jarak dan akses jalannya kurang lebih 20 kilometer dari Kota Kotanopan, sedangkan dari Siantar, memerlukan jarak lebih dekat sekitar 10 kilometer. Menurut pra riset penulis, akses jalan untuk masuk ke desa ini sangatlah sulit. Banyaknya jalan yang rusak seperti berlubang, berbatu serta kondisi lalang rumput yang masih tinggi dan semak membuat akses jalannya sulit untuk dilewati. Terlebih ketika malam hari tiba. Tidak adanya lampu jalan membuat para pejalan yang mengendarai kendaraan sulit untuk berada di jalur ini. Dikarenakan akses jalan yang rusak, banyak dari masyarakat yang juga sulit ke Kota untuk melakukan aktifitas sehari-hari, seperti menjual hasil kebun, berjualan, berbelanja dan lain sebagainya.

Baru-baru ini, Pemerintah Desa akan membuat akses jalan yang baik serta titi jembatan yang layak untuk para warga desa. Hal ini dikarenakan sudah banyaknya laporan serta guna membangun desa menjadi desa yang lebih baik lagi serta layak. Memudahkan akses perjalanan warga dan masyarakat lain yang akan menggunakan jalur desa tersebut. dengan adanya pembangunan jalan desa ini, diharap adanya partisipasi dari warga desa tersebut agar pembangunan berjalan lancar dengan hasil yang memuaskan.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat

terhadap pentingnya pembangunan sebuah desa yang bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai (1) kondisi yang tidak memuaskan dan perlu perbaikan, (2) kondisi tersebut dapat diperbaiki dengan kegiatan masyarakat tersendiri, (3) kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan, (4) adanya kepercayaan diri bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan, (Theresia, 2014:197)

Seringkali terjadi bahwa partisipasi masyarakat tidak nampak karena mereka merasa tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi atau dibenarkan berpartisipasi, khususnya yang menyangkut pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan yang akan dicapai. Karena itu melalui komunikasi, harus dijelaskan tentang segala hak dan kewajiban setiap warga masyarakat didalam proses pembangunan yang dilaksanakan, serta pada bagian kegiatan apa mereka

diharapkan untuk partisipasinya, dan apa bentuk partisipasi yang diharapkan dari masyarakat.

Keadaan umum yang sering menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah karena mereka hanya diminta untuk berpartisipasi dalam memberikan input, tanpa mengetahui dengan jelas tentang manfaat yang akan mereka peroleh dan rasakan (secara langsung atau tidak langsung).

Pemberian kesempatan berpartisipasi pada masyarakat bukanlah hanya sekedar pemberian kesempatan untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan agar mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang akan menghambat atau mengganggu tercapainya tujuan pembangunan, akan tetapi pemberian kesempatan berpartisipasi harus dilandasi oleh pemahaman bahwa masyarakat setempat layak diberikan kesempatan karena disamping memiliki kemampuan-kemampuan yang diperlukan, sebagai sesama warga negara mereka juga mempunyai hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan setiap kesempatan membangun bagi perbaikan mutu hidupnya.

Maka dari itu dibutuhkan strategi khususnya strategi komunikasi yang baik dan terarah untuk pembangunan sebuah desa, agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan baik pula. Menjadi tugas Pemerintah Daerah dalam proses perwujudannya. Bagaimana cara menerapkan strategi komunikasi yang baik agar seluruh masyarakat yang tinggal di sebuah desa ikut serta dalam melakukan pembangunan desa, untuk kemajuan desa itu tersendiri dan juga masyarakatnya. Strategi komunikasi itu sendiri mempunyai arti sebagai perencanaan (*planning*) dan

managemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan managemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan, (Effendy, 2003:301).

Strategi komunikasi dalam pembangunan sangat diperlukan untuk menciptakan perubahan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat, memerlukan sistem organisasi khusus yang menyiasati suatu rencana yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan secara signifikan. Dalam penyelenggaraan pembangunan, diperlukan suatu sistem komunikasi agar terjalin komunikasi yang efektif dan memiliki makna yang mampu mengarahkan pencapaian tujuan pembangunan. Hal itu perlu sekali dilakukan karena proses pembangunan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Komunikasi pembangunan ini harus mengedepankan sikap aspiratif, konsultatif dan relationship. Karena pembangunan tidak akan berjalan dengan optimal tanpa adanya hubungan sinergis antara pelaku dan obyek pembangunan. Apalagi proses pembangunan ke depan cenderung akan semakin mengurangi peran pemerintah, seiring semakin besarnya peran masyarakat. Agar pembangunan berjalan dengan efektif, maka diperlukan suatu pusat komunikasi yang menjadi rujukan dari pelaku-pelaku pembangunan maupun pihak-pihak yang berkompeten dalam penyelenggaraan pembangunan untuk memperoleh informasi dan koordinasi pembangunan secara terpadu. Strategi yang menekankan pada perlunya sosialisasi pembangunan kepada para pelaku pembangunan dan masyarakat secara umum melalui strategi komunikasi pemerintahan desa.

Dari uraian tersebut ,maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di desa tersebut untuk mengetahui lebih ldalam bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa dalam upaya mengajak masyarakat atau warga desa berpartisipasi guna pembangunan jalan desa Betahan, dengan judul skripsi :**“Strategi Komunikasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Di Desa Batahan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal).**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji (dibahas) dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat difokuskan dalam penelitian ini adalah : *Bagaimana Strategi Komunikasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di desa Batahan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?*

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hakikat dari penelitian yang dilakukan sesungguhnya akan diketahui setelah adanya identifikasi dan perumusan masalah. Oleh karena itu menurut Sugiyono (2010:290) menjelaskan bahwa tujuan penelitian untuk menemukan, mengembangbangkan dan membuktikan pengetahuan.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dan perumusan masalah dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu : Untuk mendeskripsikan Strategi Komunikasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Batahan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal di atas, manfaat penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang timbul di lingkungan organisasi.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran pada pemerintah khususnya dalam hal strategi komunikasi pemerintahan desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dan acuan pada peneliti selanjutnya khususnya dibidang kajian strategi komunikasi pemerintahan desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu dengan membagi menjadi beberapa bab dimana masing-masing dibagi kedalam sub-sub dengan rincian sebagai berikut:

BAB I (PENDAHULUAN)

Bab ini membahas: Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

BAB II (URAIAN TEORITIS)

Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan peneliti dalam penelitiannya. Uraian teoritis tersebut berkisar seputar pengertian dari Komunikasi, Pengertian Strategi, Strategi Komunikasi, Konsep Masyarakat Dalam Pembangunan Dan Konsep Pemerintahan Desa.

BAB III (METODE PENELITIAN)

Bab ini membahas tentang Metodologi penelitian, Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Narasumber Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV (ANALISIS HASIL PENELITIAN)

Bab ini membahas mengenai hasil temuan penelitian yang kemudian di analisis dari Strategi komunikasi Pemerintahan desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Batahan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

BAB V (PENUTUP)

Bab terakhir ini penulis berharap dapat mendeskripsikan hasil dari penelitian dan menguraikan data secara baik. Adapun beberapa uraian penting yang penulis berikan dari hasil penelitian ini akan dirangkum dalam bahasan kesimpulan. Selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini penulis memberikan saran-saran agar menjadi bahan pertimbangan tentang penulisan yang telah di angkat sebagai pokok permasalahan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Komunikasi

1. Pengertian Komunikasi

Pengertian komunikasi atau *communication* berasal dari bahasa Latin “*communis*”. *Communis* atau dalam bahasa Inggrisnya “*common*” berarti sama. Jadi, apabila kita berkomunikasi (*to communicate*), ini berarti bahwa kita berada dalam keadaan berusaha untuk menimbulkan suatu persamaan (*commonness*) dalam hal sikap dengan seseorang. Jadi, pengertian komunikasi adalah sebagai proses “menghubungi” atau “mengadakan perhubungan”. (Apriadi, 2013:7)

Istilah *komunikasi* atau dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari kata Latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti *sama*. Sama disini maksudnya adalah sama makna (Effendy, 2011:9). Menurut Effendy komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media).

Hovland, Janis dan Kelly juga membuat definisi bahwa: “*communication is the process by which an individual (the communicator) transmits stimuli (usually verbal symbols) to modify the behavior of the individuals (the audiences)*.” (Apriadi, 2013:7)

Harold Lasswell menyatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan adalah menjawab pernyataan: *who says what? In which channel? To whom? With*

what effect? Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek (akibat) tertentu. Willbur Schramm mengatakan bahwa komunikasi selalu menghendaki adanya paling sedikit tiga unsur, yaitu: sumber (*source*), pesan (*messege*), dan sasaran (*destination*). (Apriadi, 2013:7)

Kata kunci dari komunikasi adalah adanya sesuatu “makna” atau pengertian (*meaning*) yang terkandung dalam setiap pesan (ide gagasan, informasi, perasaan, dan lain-lain) yang perlu dipahami bersama oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi.

Berangkat dari beberapa defenisi yang dikemukakan para ahli, maka Suprpto (2011) menggolongkan ada tiga pengertian utama komunikasi, yaitu pengertian secara etimologis, terminologis, dan paradigmatis. (Apriadi, 2013:8)

- a) Etimologis, komunikasi dipelajari menurut asal-usul kata, yaitu komunikasi berasal dari bahasa Latin *communication*.
- b) Terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian pesan pernyataan oleh seseorang kepada orang lain.
- c) Paradigmatis, komunikasi berarti pola yang meliputi sejumlah komponen berkorelasi satu sama lain secara fungsional untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya, adalah ceramah, kuliah dakwah, diplomasi, dan sebagainya. Demikian pula pemberitaan surat kabar dan majalah, penyiaran radio san televise dan pertunjukan film di gedung bioskop, dan lain-lain.

Lasswell dalam Cangara (2014 : 21) mengatakan bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi adalah menjawab pertanyaan “Siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya”.

Kemudian Steven dalam Cangara (2014: 21) justru mengajukan sebuah definisi yang lebih luas, bahwa komunikasi terjadi kapan saja suatu organisme member reaksi terhadap suatu objek atau stimuli. Apakah itu berasal dari seseorang atau dari lingkungan sekitarnya.

Selanjutnya definisi yang dibuat oleh kelompok sarjana komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antar manusia (*Human Communication*) dalam Cangara (2014 :21-22) mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antarsesama manusia; (2) melalui pertukaran informasi; (3) untuk menguatkan sikap dan tingkahlaku oranglain; serta (4) berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu

Rogers dalam Cangara (2014 :21-22) mengatakan bahwa komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.

Kemudian defenisi tersebut dikembangkan oleh Rogers bersama D. Lawrence Kincaid dalam Cangara (2014:21-22) sehingga melahirkan suatu definisi baru yang menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu

sama lainnya, yang padagilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.

Shannon dan Weaver dalam Cangara (2014:22-23) mengatakan bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh memengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Oleh karena itu, jika kita berada dalam situasi berkomunikasi, kita memiliki kesamaan dengan orang lain, seperti kesamaan bahasa atau kesamaan arti dari symbol-simbol yang digunakan dalam berkomunikasi.

Beberapa defenisi menurut para pakar menurut bidang ilmunya (Cangara, 2012:21-22):

- a) Defenisi singkat menurut Harold D. Lasswell.

Bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan “siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya”.

- b) Menurut Steven

Bahwa komunikasi terjadi kapan saja suatu organisme memberi reaksi terhadap suatu objek atau stimuli.

- c) Everett M. Rogers pakar sosiologi

Komunikasi adalah sebuah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.

- d) Rogers mengembangkan definisi tersebut bersama D. Lawrence Kincaid (1981).

Melahirkan suatu definisi baru yang menyatakan bahwa, komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk dan melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian mendalam (Cangara, 2012:22)

- e) Menurut Weaver (1949)

Bahwa komunikasi adalah manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja (Cangara, 2012:22)

Komunikasi memiliki sejumlah arti. Para pakar telah membuat banyak upaya untuk mendefinisikan komunikasi. Namun, menetapkan satu definisi tunggal terbukti tidak mungkin dan berguna. Definisi mana yang dipilih, tergantung pada kegunaannya dan dalam hal apa definisi diperlukan. Berikut tiga kategori definisi komunikasi, (Daryanto 2010:10) adalah sebagai berikut :

- a) Tingkat observasi yakni bersifat umum adalah definisi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan. Dalam hal yang lebih khusus, definisi komunikasi adalah alat untuk mengirimkan pesan militer, perintah dan sebagainya melalui telepon, telegraf, radio, kurir dan lainnya.
- b) Tingkat keberhasilan yakni menekankan keberhasilan dan diterimanya pesan yaitu definisi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi untuk mendapatkan saling pengertian. Sementara itu,

yang tidak menekankan keberhasilan misalnya defenisi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah proses transmisi informasi.

- c) Tingkat kesengajaan yakni yang mengisyaratkan kesengajaan yaitu defenisi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah situasi-situasi yang memungkinkan suatu sumber mentransmisikan suatu pesan kepada seorang penerima dengan disadari mempengaruhi perilaku penerima.

2. Unsur-Unsur Komunikasi

Dari pengertian komunikasi yang telah dikemukakan, jelas bahwa komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi jika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, artinya komunikasi hanya dapat terjadi kalau didukung oleh sumber, pesan, media, penerima pesan (komunikan) dan efek. Unsur-unsur ini bisa juga disebut komponen atau elemen komunikasi.

Menurut Harold Lasswell (Effendy, 2005:22) terdapat 5 unsur dalam komunikasi, yaitu:

- a. Komunikator (siapa yang mengatakan)
- b. Pesan (mengatakan apa)
- c. Alat atau media (kepada siapa)
- d. Komunikan (kepada siapa)
- e. Efek (dengan dampak / efek apa?)

Menurut Aristoteles (Cangara, 2004: 22) ahli filsafat Kuno dalam bukunya *Rhetorica* menyebutkan bahwa suatu proses komunikasi memerlukan tiga unsur

yang mendukungnya, yakni siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan dan siapa yang mendengarkan.

Claude E. Shannon dan Warren Weaver 1949 (Cangara, 2004:23), dua orang insinyur listrik menyatakan bahwa terjadinya proses komunikasi memerlukan 5 unsur yang mendukungnya, yakni pengirim, transmitter, signal, penerima dan tujuan. Meski pandangan Shannon dan Weaver ini pada dasarnya berasal dari pemikiran proses elektronika, tetapi para sarjana yang muncul di belakangnya mencoba menerapkannya dalam proses komunikasi antarmanusia seperti yang dilakukan Miller.

Awal tahun 1960-an David K. Belo (Cangara, 2004:23) membuat formula komunikasi yang lebih sederhana. Formula ini dikenal dengan nama "SMCR", yakni *Source* (pengirim), *Message* (pesan), *channel* (saluran-media) dan *Receiver* (penerima).

Perkembangan terakhir adalah munculnya pandangan dari Joseph De Vito, K. Sereno dan Erika Vora (Cangara, 2004:24) yang menilai faktor lingkungan merupakan unsur yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung terjadinya proses komunikasi.

3. Fungsi Komunikasi

William I. Loren Anderson (Mulyana, 2005:5-30), mengategorikan fungsi komunikasi menjadi 4, yaitu:

- a) Sebagai komunikasi sosial

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep

diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tegangan dan tekanan, antara lain lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur danb memupuk hubungan dengan orang lain.

b) Sebagai komunikasi ekspresif

Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan peerasaan-perasaan (emosi) kita. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalaui pesan-pesan nonverbal. Perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut dapat disampaikan lewat kata-kata, namun bisa disampaiakn lebih ekspresif lewat perilaku nonverbal. Misalnya ibu menunjukkan rasa kasih sayangnya dengan membelai kepala anaknya.

c) Sebagai komunikasi ritual

Komunikasi ritual biasanya dapat terlihat pada suatu komunitas yang melakukan upacara-upacara yang disebut oleh para antropolog sebagai rites of passage, seperti upacara kelahiran, upacara pernikahan dan siraman. .dalam acara tersebut orang-orang biasanya mengucapkan kata-kata atau perilaku-perilaku simbolik.

d) Sebagai komunikasi instrumental

Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu: menginformasikajn, mengajar, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan tindakan, dan juga menghibur.

4. Proses Komunikasi

Effendy (2003: 33) mengemukakan proses komunikasi dalam perspektif mekanistik dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Proses Komunikasi Secara Primer

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan lambang sebagai media atau saluran.

a. Lambang Verbal

Effendy (2003:33) mengemukakan bahwa proses komunikasi bahasa sebagai lambang verbal paling banyak dan paling sering digunakan. Hal ini disebabkan bahasa dianggap mampu mengungkapkan pikiran komunikator mengenai hal, peristiwa, baik yang konkret maupun yang abstrak yang terjadi masa kini, lalu dan masa yang akan datang.

b. Lambang Nonverbal

Lambang nonverbal adalah lambang yang dipergunakan dalam komunikasi yang bukan bahasa, misalnya, isyarat dengan anggota tubuh, antara lain kepala, mata, bibir, tangan dan jari. Penggunaan gambar adalah lambang lain yang dipergunakan dalam berkomunikasi nonverbal.

Mark Knap (Cangara, 2004:100) menyebutkan bahwa penggunaan kode verbal dalam berkomunikasi memiliki fungsi untuk:

- 1) Meyakinkan apa yang diucapkan (*Repetition*)
- 2) Menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata (*Subtation*).

3) Menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya (*Identity*)

4) Menambah atau melengkapi ucapan yang dirasa belum sempurna

2. Proses Komunikasi Secara Sekunder

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama (Effendy, 2003:17).

Komunikator menggunakan media kedua ini karena komunikan yang dijadikan sasaran komunikasinya jauh tempatnya atau jumlahnya banyak. Kalau komunikan jauh, dipergunakanlah surat atau telepon. Jika komunikan banyak, dipakailah perangkat penguat suara.

3. Proses Komunikasi Secara Linear

Proses komunikasi secara linear, sebagaimana dikemukakan oleh Effendy (2003:39) yaitu mengandung makna lurus. Jadi proses linear berarti perjalanan dan satu titik ke titik lain secara lurus. Dalam konteks komunikasi, proses linear adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Biasanya berlangsung pada komunikasi bermedia.

4. Proses Komunikasi Secara Sirkular

Istilah sirkular sebagai terjemahan dan perkataan circular yang secara harfiah artinya bulat, bundar. Effendy (2003: 39) penggunaan dalam komunikasi yang dimaksudkan yaitu proses sirkular itu adalah terjadinya *Feedback* yaitu terjadinya arus dari komunikan ke komunikator. Oleh karena itu, ada kalanya

Feedback mengalir dan komunikasi ke komunikator itu adalah *Response* atau tanggapan komunikasi terhadap pesan yang ia terima dan komunikator.

5. Hambatan Komunikasi

Menurut Ruslan (2008 : 9-10) hambatan-hambatan dalam komunikasi adalah sebagai berikut :

1) Hambatan Dalam Proses Penyampaian (*Sender Barries*)

Hambatan di sini bisa datang dari pihak komunikatornya yang mendapat kesulitan dalam menyampaikan pesan –pesannya, tidak menguasai materi pesan dan belum memiliki kemampuan sebagai komunikator yang handal. Hambatan ini bisa juga berasal dari penerima pesan tersebut (*receiver barrier*) karena sulitnya komunikasi dalam memahami pesan itu dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat penguasaan bahasa, pendidikan, intelektual dan sebagainya yang terdapat dalam diri komunikasi. Kegagalan komunikasi dapat pula terjadi dikarenakan faktor-faktor : *feed backnya* bahasa tidak tercapai, *medium barrier* (media atau alat yang dipergunakan kurang tepat) dan *decoding barrier* (hambatan untuk memahami pesan secara tepat)

2) Hambatan secara Fisik (*Phsysical Barries*)

Sarana fisik dapat menghambat komunikasi yang efektif, misalnya pendengaran kurang tajam dan gangguan pada sistem pengeras suara (*sound system*) yang sering terjadi dalam suatu ruangan kuliah/seminar/pertemuan. Hal ini dapat membuat pesan –pesan itu tidak efektif sampai dengan tepat kepada komunikasi.

3) Hambatan Semantik (*Semantik Pers*)

Hambatan segi semantik (bahasa dan arti perkataan), yaitu adanya perbedaan pengertian dan pemahaman antara pemberi pesan dan penerima tentang satu bahasa atau lambang. Mungkin saja yang disampaikan terlalu teknis dan formal, sehingga menyulitkan pihak komunikan yang tingkat pengetahuan dan pemahaman bahasa teknis komunikator yang kurang.

4) Hambatan Sosial (*sychossial noises*)

Hambatan adanya perbedaan yang cukup lebar dalam aspek kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, persepsi, dan nilai-nilai yang dianut sehingga kecenderungan, kebutuhan serta harapan-harapan kedua belah pihak yang berkomunikasi juga berbeda.

B. Strategi

1. Pengertian Strategi

Clausewitz dalam Cangara (2014 : 64) merumuskan strategi ialah suatu seni menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang. Kemudian Marthin-Anderson dalam Cangara (2014 : 64) juga merumuskan strategi adalah seni dimana melibatkan kemampuan inteligensi/pikiran untuk membawa semua sumberdaya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien.

Cangara (2014 : 64) mengatakan bahwa dalam menangani masalah komunikasi, para perencana dihadapkan pada sejumlah persoalan terutama dalam kaitannya dengan strategi penggunaan sumberdaya komunikasi yang tersedia untuk mencapai tujuan yang dicapai. Rogers dalam Cangara (2014 : 64) memberi

batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkahlaku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton membuat definisi dengan menyatakan bahwa strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dalam semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.

Menurut Cangara (2014 : 65) pemilihan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam perencanaan komunikasi, sebab jika pemilihan strategi salah atau keliru maka hasil yang diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi waktu, materi, dan tenaga. Oleh karena itu, strategi juga merupakan rahasia yang harus disembunyikan oleh para perencana.

Pada tahun 1996, Harvard *Business me review* buku-buku Porter sebelumnya. Porter berpendapat bahwa “strategi kompetitif” merupakan tindakan untuk membuat sesuatu menjadi berbeda-beda. Dia menambahkan “itu berarti kita sengaja memilih serangkaian kegiatan yang berbeda untuk memberikan nilai campuran yang unik” (Liliwari, 2010:243).

Buku *Top Management Strategy* (Liliwari, 2010:243) yang ditulis oleh Benjamin Tregoe dan John Zimmerman dan Kepner-Tregoe mendefinisikan sebagai kerangka kerja yang membimbing orang-orang untuk memilih dan menentukan sifat dan arah dan sebuah organisasi.

Menurut Basu (2007:61) strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi strategi merupakan perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu dan praktek operasionalnya.

Menurut Efendy (2005:309) strategi adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Demikian juga strategi komunikasi pemasaran merupakan panduan dan perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan.

Definisi strategi pertama yang dikemukakan oleh Jauch & Glueck (dalam Akdon,2011:13), menyebutkan bahwa Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Kemudian strategi menurut Salusu (2006:101) yaitu suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Pada dasarnya strategi itu sangat penting dipahami oleh setiap eksekutif, manajer, kepala atau ketua, direktur, pejabat senior dan junior, pejabat tinggi, menengah, dan rendah. Hal ini harus dihayati karena strategi dilaksanakan oleh setiap orang pada setiap tingkat.

2. Tingkat-Tingkat Strategi

Merujuk pada pandangan Higgins (Salusu, 2006:101), menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Adapun keseluruhannya adalah sebagai berikut :

a) *Enterprise Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi *enterprise* terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b) *Corporate Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *Grand Strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu, tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit. Apakah misi universitas yang utama? Apakah misi yayasan ini, yayasan itu, apakah misi lembaga ini, lembaga itu? Apakah misi utama direktorat jenderal ini, direktorat jenderal itu? Apakah misi badan ini, badan itu? Begitu seterusnya

c) *Business Strategy*

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan strategi yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

d) *Functional Strategy*

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu:

- Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
- Strategi fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing, dan integrating.*
- Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah

C. Strategi Komunikasi

1. Pengertian Strategi Komunikasi

Keberhasilan kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh penentuan strategi komunikasi. Di lain pihak jika tidak ada strategi komunikasi yang baik, efek dan proses komunikasi (terutama komunikasi media massa) bukan tidak mungkin akan menimbulkan pengaruh negatif. Lalu sebenarnya, strategi komunikasi menurut Liliweri (2010:240) adalah:

- 1) Strategi komunikasi mengartikulasikan, menjelaskan dan mempromosikan suatu visi komunikasi dan satuan tujuan komunikasi dalam suatu rumusan yang baik
- 2) Strategi komunikasi untuk menciptakan komunikasi yang konsisten, komunikasi yang dilakukan berdasar satu pilihan (keputusan) dan beberapa opsi komunikasi
- 3) Strategi komunikasi berbeda dengan taktik, strategi komunikasi menjelaskan tahapan kongkrit dalam rangkaian aktivitas komunikasi yang berbasis pada satuan teknik bagi pengimplementasian tujuan komunikasi
- 4) Strategi komunikasi berperan memfasilitasi perilaku untuk mencapai tujuan komunikasi manajemen

Arti dan strategi komunikasi (Effendy, 2003:82) menyatakan bahwa “strategi komunikasi merupakan paduan dan perencanaan komunikasi (*Communication Planning*) dan manajemen (*Communication Management*) untuk mencapai suatu tujuan”. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti

bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dan situasi dan kondisi.

Strategi komunikasi menurut Onong Uchjana (Efendy, 2005:82) yaitu strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*Management*) untuk mencapai tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

2. Langkah-langkah Strategi Komunikasi

Pada dasarnya, menurut Liliweri (2010:250) strategi komunikasi itu harus dimulai dengan beberapa poin, antara lain sebagai berikut :

1) Mengidentifikasi visi dan misi

Visi merupakan cita-cita ideal jangka panjang yang dapat dicapai oleh komunikasi. Rumusan visi biasanya terdiri dari “beberapa kata” yang mengandung tujuan, saran dan cita-cita ideal komunikasi. Dan rumusan itulah akan dirumuskan misi yang menjabarkan cita-cita ideal ini.

2) Menentukan program dan kegiatan

Program dan kegiatan adalah serangkaian aktifitas yang harus dikerjakan. Program dan kegiatan merupakan penjabaran dan misi.

3) Menentukan tujuan dan hasil

Setiap program atau kegiatan biasanya mempunyai tujuan dan hasil yang akan diperoleh. Biasanya para perumus kebijakan membuat definisi tentang tujuan dan hasil yang akan dicapai.

4) Seleksi audiens yang menjadi sasaran

Perencana komunikasi menentukan kategori audiens yang menjadi sasaran komunikasi.

5) Mengembangkan pesan

Kriterianya adalah semua pesan yang dirancang sedapat mungkin memiliki isi (*content*) khusus yang jelas, persuasif, dan merefleksikan nilai-nilai audiens, tampilan isi yang dapat memberikan solusi bagi masyarakat atau menentukan tindakan tertentu.

6) Identifikasi pembawa pesan (tampilan komunikator)

Kriteria komunikator antara lain kredibilitas, kredibilitas dalam ilmu pengetahuan, keahlian, profesional dan keterampilan yang berkaitan dengan isu tertentu.

7) Mekanisme komunikasi/media

Kriterianya adalah memilih media yang dapat memperlancar mekanisme pengiriman dan pengiriman balik atau pertukaran informasi. Kriteria media adalah media yang mudah diakses atau yang paling disukai audiens. Misalnya melalui radio, koran dan leaflet.

8) Scan konteks dan persaingan

Kriterianya adalah menghitung resiko dan konteks yang akan mempengaruhi strategi komunikasi, misalnya menghitung peluang untuk memenangkan persaingan dengan merebut hati audiens.

3. Tujuan Strategi Komunikasi

Sementara tujuan strategi komunikasi itu sendiri menurut Liliweri (2010:248) adalah sebagai:

- a) Memberitahu (*Announcing*)
- b) Memotivasi (*Motivating*)
- c) Mendidik (*Educating*)
- d) Menyebarkan informasi (*Informing*)
- e) mendukung Pembuatan Keputusan (*supporting Decision Making*)

Selain dan itu, strategi komunikasi juga bertujuan agar:

- 1) Pesan mudah dipahami agar benar
- 2) Penerima pesan dapat dibina dengan baik
- 3) Kegiatan dapat termotivasi untuk dilakukan

4. Prinsip-Prinsip Strategi Komunikasi

Menurut Liliweri (2010:256), prinsip-prinsip dan strategi komunikasi juga berperan penting dalam penerapan strategi komunikasi. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- 1) *Integrate*, Adalah proses untuk menggabungkan berbagai aktifitas yang berkaitan dengan satu program komunikasi.
- 2) *Straight forward*. Katakanlah ini pada semua orang, kejujuran menyertai perjalanan kita. Inilah perjuangan masa depan.
- 3) *Succinct*, Adalah pesan strategis, umumnya pendek dan sederhana. *Target-segment*, Yaitu tetapkan segmen yang akan menjadi sasaran.

- 4) *Personalia*, Adalah bantuan para pekerja untuk mengerti dampak personal. Pertanyaan yang esensi dan setiap komunikasi membutuhkan jawaban “apa yang saya dapat dari komunikasi ini”.
- 5) *Memorable*, Adalah buatan ukuran terhadap hasil komunikasi yang akan kita lakukan, misalnya para pekerja dapat melakukan kegiatan komunikasi 100 kali setiap hari.
- 6) *Multimedia*, Yaitu dengan menggunakan metode dan media massa yang bervariasi, departemen pemasaran anda dapat mengerjakan anda tentang komunikasi dengan media ini.
- 7) *Be Realistic*, Yaitu hendaklah realistis, tentukan dimata tempat bagi orang-orang yang akan bertemu dengan anda.
- 8) *Be Result* adalah orientasi kerja komunikasi yang efektif.

Pada bagian akhir dan strategi komunikasi tersebut, terdiri dari 4 tahapan/jenis kegiatan yaitu:

- 1) Mendukung komunikasi terutama pada level kepemimpinan
- 2) Melengkapi sumber daya
- 3) Mengintegrasikan komunikasi melalui organisasi
- 4) Melibatkan staff pada semua level untuk memberikan dukungan dan integrasi

D. Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Bornby dalam Mardikanto dan Soebiato (2016 : 71) mengatakan bahwa partisipasi adalah tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau

pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Kemudian Theodorson dalam Mardikanto dan Soebiato (2016 : 71) mengatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan dan propesinya sendiri. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.

Mardikanto dan Soebiato (2016 : 72) mengatakan bahwa dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan pedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri tetapi juga menurut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

YADAV dalam Mardikanto dan Soebiato (2016 : 72) mengatakan bahwa ada 4 macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu:

- a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan
- b) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
- c) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan
- d) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Dusseldorp dalam Mardikanto dan Soebiato (2016 : 84) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dengan berupa:

- a) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
- b) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
- c) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain
- d) Menggerakkan sumberdaya masyarakat
- e) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- f) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya

E. Konsep Pemerintahan Desa

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten. Pengertian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi. Beberapa hal mendasar tentang penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi desa dalam Cangara (2014 : 233) :

- a. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan perwakilan desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada Bupati.

- c. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.
- d. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk badan perwakilan desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan.
- e. Di desa di bentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai kebutuhan. Lembaga dimaksud merupakan mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
- f. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lainnya, sumbangan pihak ketiga, dan pinjaman desa.
- g. Berdasarkan hak asal usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang medamaikan perkara atau sengketa daripada warganya.

Cangara (2014 : 237) mengatakan bahwa susunan pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemdes di pimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepda kepala desa. BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi

adat istiadat, membuat peraturan desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Cangara (2014 : 238) mengatakan bahwa jumlah dan jabatan perangkat desa disesuaikan dengan tradisi dan perkembangan setempat yang di atur melalui perda dan perdes yaitu :

- a. Unsur staf, yaitu petugas pelayanan kegiatan administrasi pemerintahan desa, seperti sekretaris desa dan atau tata usaha desa.
- b. Unsur pelaksana, yaitu: pelaksana teknis lapangan.
- c. Unsur wilayah yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa, seperti kepala dusun.

Cangara (2014 : 238) melanjutkan bahwa sistem administrasi pemerintahan desa yang di kembangkan berupa pelayanan administrasi yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien kepada masyarakat. Disamping itu, pemerintahan desa menyusun administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan kepada BPD yang tembusannya disampaikan kepada Camat dan Bupati. Jika mendapatkan penugasan yang disertai pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah desa wajib melaporkan pelaksanaannya kepada yang memberikan tugas.

Menurut Cangara (2014 : 238) BPD merupakan lembaga perwakilan rakyat ditingkat desa yang memiliki kedudukan setara dengan kepala desa. BPD

menjadi mitra kerja kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan setempat. BPD berfungsi mengayomi ada istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan atas kinerja kepala desa dan perangkat desa. Susunan dan kelengkapan BPD sebagai berikut:

- a. Keanggotaan BPD terdiri dari pemuka masyarakat yang dipilih dari, oleh dan untuk masyarakat desa setempat untuk masa kerja lima tahun.
- b. Alat kelengkapan BPD terdiri dari pimpinan, komisi-komisi, dan panitia-panitia.
- c. Pimpinan BPD terdiri dari seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.
- d. Komisi-komisi BPD terdiri dari tiga komisi yaitu komisi a yang membidangi pemerintahan, komisi b membidangi pembangunan, dan komisi c membidangi kesejahteraan rakyat.
- e. Panitia-panitia di bentuk oleh BPD diantaranya panitia pemilihan kepala desa, panitia pemilihan anggota BPD, panitia anggaran, panitia khusus, dan panitia lain sesuai kebutuhan.

Peran serta masyarakat dalam pemerintahan desa dilakukan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran untuk melibatkan diri dalam pengelolaan pembangunan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan maupun pemilikan dan pengembangan.
- b. Memberikan masukan dan kritik yang membangun kepada pemerintahan desa.

- c. Memenuhi kewajiban sebagai warga desa atau sebagai peraturan atau ketentuan yang berlaku atau didasarkan kepada kesepakatan bersama.
- d. Turut memiliki, melestarikan nilai, norma dan adat istiadat desa.
- e. Menjaga dan melestarikan nilai, norma dan adat istiadat desa.
- f. Menggunakan hak-hak sebagai warga desa.

Menurut Cangara (2014 : 238) desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem kenegaraan kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan mengatur, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakat secara mandiri.

Menurut Cangara (2014 : 239-240) Masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Peranan kelompok primer sangat besar.
- b. Factor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat.
- c. Hubungan lebih bersifat intim dan awet.
- d. Struktur masyarakat bersifat homogen.
- e. Tingkat mobilitas sosial rendah.
- f. Keluarga lebih ditekankan kepada fungsinya sebagai unit ekonomi.
- g. Proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 7, memberikan gambaran dalam pelaksanaan otonomi desa secara luas, nyata, bertanggungjawab, dimana di dalamnya disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan, dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya (yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000). Disamping itu keluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Menurut Hari Sabarno (2007: 31), pengertian luas dalam penyelenggaraan otonomi daerah merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan yang dikecualikan pada bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konversi, dan standarisasi nasional.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang didaerah. Pemerintah daerah selain berperan melindungi masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat juga harus mampu mengelola berbagai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepadanya. Dalam pengelolaan kewenangan yang luas tersebut tetap dibatasi rambu penting dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, otonomi bukanlah semata-mata menggunakan pendekatan administratif atau sekedar meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja saja, akan tetapi sekaligus pendekatan dalam dimensi politik. Dengan demikian, makna kewenangan dibidang pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sejauh mungkin harus dapat dilayani secara dekat dan cepat

F. Konsep Pembangunan Desa

Menurut Cangara (2014 : 240) pembangunan masyarakat desa mengandung maksud pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan dan pengorganisasian masyarakat. Sedangkan pembangunan desa sebagai *rural development* lebih luas dimana pembangunan masyarakat desa sudah tercakup didalamnya, bahkan sekaligus terintegrasi pula sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan.

Menurut Cangara (2014 : 241) tujuan pembangunan desa identik dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur material

spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis.

Djiwadono dalam Cangara (2014 : 241) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi: Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan *productivity* di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam pemanfaatan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan. Jelas sekali bahwa usaha untuk mencapai tujuan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal.

Napitupulu dalam Menurut Cangara (2014 : 241) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan masalah yang paling penting terutama dalam hal partisipasi masyarakat secara maksimal dalam usaha-usaha pembangunan dan memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan. Kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dibedakan dengan mutlak. Karena hakikatnya di dalam pembangunan desa sudah tercakup di dalamnya pembangunan masyarakat desa.

Menurut Azam Awang dalam Cangara (2014 : 241-242) terdapat tiga model pembangunan pedesaan diantaranya sebagai berikut: pertama, model *community development* atau pembangunan masyarakat, sejarah panjangnya berawal pertama kali dikembangkan oleh pemerintah kolonial Inggris di Etawah, India, pada tahun 1920. Model ini mengajarkan kepada penduduk pedesaan keterampilan social, ekonomi dan politik agar tercipta masyarakat yang modern. Kedua, partisipasi rakyat dalam pembangunan, yang mulai berkembang pada tahun 1970an akibat gagalnya model “trickle down” guna pemerataan hasil pembangunan. Model ini merupakan *empowerment* atau pemberdayaan masyarakat yang mengusung tema pembangunan dari bawah *partisipasi masyarakat* atau *bottom-up*. Ketiga, model desentralisasi, yaitu pemerintah pusat member kewenangan kepada pemerintah daerah tingkat bawah untuk melaksanakan program-program yang direncanakan.

Djiwandono dalam Cangara (2014 : 242) mengatakan bahwa pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, tentram dan dinamis. Secara rinci Djiwandono, menjelaskan tujuan pembangunan desa meliputi:

1. Tujuan ekonomis, yaitu meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan
2. Tujuan social, kearah pemerataan kesejahteraan penduduk desa, dan budaya dalam arti peningkatan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan

3. Tujuan demografis, kearah meningkatkan potensi sumberdaya alam, dan tigkat kepadatan penduduk per-kapita.
4. Tujuan politis, dalam arti menumbuh dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Wahyudi dalam Cangara (2014 : 242) mengatakan bahwa dalam penusunan dan perumusan pendekatan pembangunan desa sifatnya menyeluruh, namun dalam pelaksanaannya paling tidak terdapat dua hal yang perlu dipertimbangkan: pertama, perumusan kebijakan dan pendekatan pembangunan yang berupaya meletakkan kembali format, tatanan dan kelembagaan masyarakat desa yang sesuai dengan nilai-nilai, budaya, historis, dan pola hidup masyarakat. Setiap periode perkembangan suatu daerah memiliki semangat budaya, perangkat kelembagaan dan pranata menurut jamannya. Apa yang dinilai baik, mungkin hanya berlaku pada komunitas dan waktu tertentu. Struktur atau komposisi masyarakat pedesaan sekarang (pasca reformasi) berbeda disbanding masa orde lama dan orde baru, dimana partisipasi dan pengambilan keputusan menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi yang kondusif ini masih perlu dirumuskan lebih lanjut dengan melibatkan semua stakeholder kontekstual. Kedua, jangan terjebak kembali pada kekeliruan masa lalu, yang berupaya memecahkan masalah pembangunan melalui penyusunan suatu kebijakan perencanaan yang bersifat umum dan diberlakukan secara seragam untuk setiap daerah. Pengalaman penyelenggaraan pembangunan di berbagai

negara, menunjukkan bahwa scenario pembangunan yang disusun secara umum kurang berhasil atau paling tidak mampu mencapai target atau sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Mensosialisasikan rancangan atau skenario yang bersifat umum selalu sulit dilaksanakan dan lebih banyak bersifat mekanistik dan terlepas dari kondisi local yang sangat spesifik, sehingga mematiakan inisiatif masyarakat setempat. Proses penentuan kebijakan pembangunan menjadi milik pemerintah

Selanjutnya Cangara (2014 : 242) menjelaskan bahwa perjalanan pembangunan pedesaan di Indonesia terjadi kemajemukan sistem nilai dan budaya, ternyata telah mengalami pula latarbelakang sejarah yang cukup panjang, tentunya dalam pendekatan yang berbeda pula. Latar belakang seperti inilah yang perlu dicermati dalam memilih prinsip dasar pembangunan pedesaan di Indonesia secara integral. Kelembagaan, termasuk organisasi, dan perangkat peraturan dan hukum memerlukan penyesuaian, sehingga peluang bagi setiap warga masyarakat untuk berpartisipasi dan bertindak aktif dalam pembangunan dapat tumbuh disemua bidang kehidupannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka atau model pembangunan desa yang berpayung pada hukum dan perundang-undangan agar tercipta peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan peluang tersebut.

Cangara (2014 : 252) mengatakan bahwa pembangunan desa (rural development) mengandung maksud pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan (community approach) dan pengorganisasian masyarakat

(community organization) sekaligus terintegrasi pula sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan.

Rahim dalam Mardikanto (2017 : 22) mengungkapkan bahwa didalam setiap proses pembangunan pada dasarnya terdapat dua kelompok atau “sub-sistem” pelaku-pelaku pembangunan, yang terdiri atas:

1. Sekelompok kecil warga masyarakat yang merumuskan perencanaan dan berkewajiban untuk mengorganisasi dan menggerakkan warga masyarakat yang lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pengertian merumuskan perencanaan pembangunan itu, tidak berarti bahwa ide-ide yang berkaitan dengan rumusan kegiatan dan cara mencapai tujuan hanya dilakukan sendiri oleh kelompok ini, akan tetapi mereka sekedar merumuskan semua ide-ide atau aspirasi yang dikehendaki oleh seluruh warga masyarakat melalui suatu mekanisme yang telah disepakati. Sedangkan perencanaan pembangunan diurus yang paling bawah, disalurkan melalui pertemuan kelompok atau permusyawaratan pada lembaga yang terbawah secara formal maupun informal.
2. Masyarakat luas yang berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pemberian input (ide, biaya, tenaga, dll). Pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan, serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Dalam kenyataan, pelaksana utama kegiatan pembangunan justru terdiri dari kelompok ini; sedang kelompok “ elit masyarakat” hanya berfungsi sebagai penerjemah “kebijakan dan perencanaan pembangunan” sekaligus mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

Mardikanto (2017 : 23) menjelaskan sub-sistem “pemerintah dan penggerak” adalah : semua aparat pemerintahan, penyuluh (*change agent*), kerja sosial, tokoh-tokoh masyarakat (formal dan informal) aktivitas Lsm/Lpsm yang terlibat dan berkewajiban untuk :

- a. Bersama-sama warga masyarakat merumuskan dan mengambil keputusan dan memberikan legitimasi tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan;
- b. Menginformasikan dan atau menerjemahkan kebijakan dan perencanaan pembangunan kepada seluruh warga masyarakat;
- c. Mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat;
- d. Bersama-sama masyarakat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan;
- e. Mengupayakan pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang terlibat langsung sebagai pelaksanaan dan atau dijadikan sasaran utama pembangunan secara adil.

Sedang yang dimaksudkan dengan sub-sistem masyarakat atau pengikut, adalah : sebagian besar warga masyarakat yang tidak termasuk dalam sub-sistem “pemerintah/penggerak” diatas, yang berkewajiban untuk:

- a. Menyampaikan ide-ide atau gagasan tentang kegiatan pembangunan yang perlu dilaksanakan, dan cara mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan baik secara langsung maupun melalui perwakilannya yang sah dalam suatu forum yang diselenggarakan untuk keperluan tersebut;

- b. Secara positif menerima dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan, sejak pengambilan keputusan tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan, dan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan secara adil sesuai dengan fungsi dan pengorbanan yang telah diberikan;
- c. Memberikan masukan atau umpan balik tentang kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan;
- d. Menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Sehubungan dengan itu, demi keberhasilan pembangunan kedua kelompok pelaku-pelakupembangunan perlu menjalin hubungan psikologis yang akrab, sehingga dapat terjalin komunikasi atau berinteraksi secara efektif. Disamping itu, antar pelaku-pelaku pembangunan didalam setiap kelompoknya masing-masing juga perlu melakukan hal yang sama.

Mardikanto (2017 : 24) menatakan bahwa beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari kedua sub sistem pelaku-pelaku pembangunan:

1. Aparat pemerintah/penguasa, didalam pengambilan keputusan tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan harus senantiasa mau mendengarkan, memahami, dan menghayati aspirasi masyarakat, memahami kondisi dan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi masyarakat. Untuk itu, terdapat tiga hal yang harus selalu diingat, yaitu (Loekman Sutrisno dan Dove) :
 - a. Adanya keterlibatan anggota-anggota masyarakat untuk memberitahukan kepada penguasa tentang apa dan bagaimana dengan

sebaik-baiknya pembangunan yang direncanakan harus mampu menolong mereka, dan sebaliknya, penguasa tidak boleh hanya percaya terhadap hasil-hasil konsultasi antar jenjang birokrasi pemerintah;

- b. Adanya hak “tawar-menawar” (bargaining power) yang memiliki sub-sistem pengikut (masyarakat). Artinya, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk bila perlu menolak kebijakan atau program-program dan proyek pembangunan yang tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat, atau kegiatan pembangunan yang akan terlalu banyak menuntut pengorbanan masyarakat tanpa imbalan manfaat yang layak yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang akan diwajibkan untuk memberikan pengorbanan tersebut;
 - c. Setiap perencanaan harus selalu merupakan “proses belajar” (learning process), yaitu perlunya adanya keinginan para perumus kebijakan dan perencanaan pembangunan untuk belajar dari pengalaman masyarakat dan menggunakannya sebagai acuan sebelum pengambilan keputusan;
2. Masyarakat harus selalu diberitahu tentang apa yang sedang dan telah direncanakan oleh penguasa, serta diberitahu cara-cara yang telah dipilih untuk melaksanakan pembangunan yang direncanakan itu. Untuk selanjutnya, masyarakat harus aktif mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut;

3. Masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya (pengetahuan, sikap, keterampilan) dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dan didalam setiap kegiatan pembangunan, sejak pengambilan keputusan perencanaan pembangunan hingga pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis, (Sugiyono 2015: 1819).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penulis untuk riset penelitian skripsinya adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya nibelum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Jenis peneliian ini juga disebut sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolola) dan disebut juga sebagai penelitian interpretive, karena data hasil penelitian lebih

berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan, (Sugiyono, 2010:14).

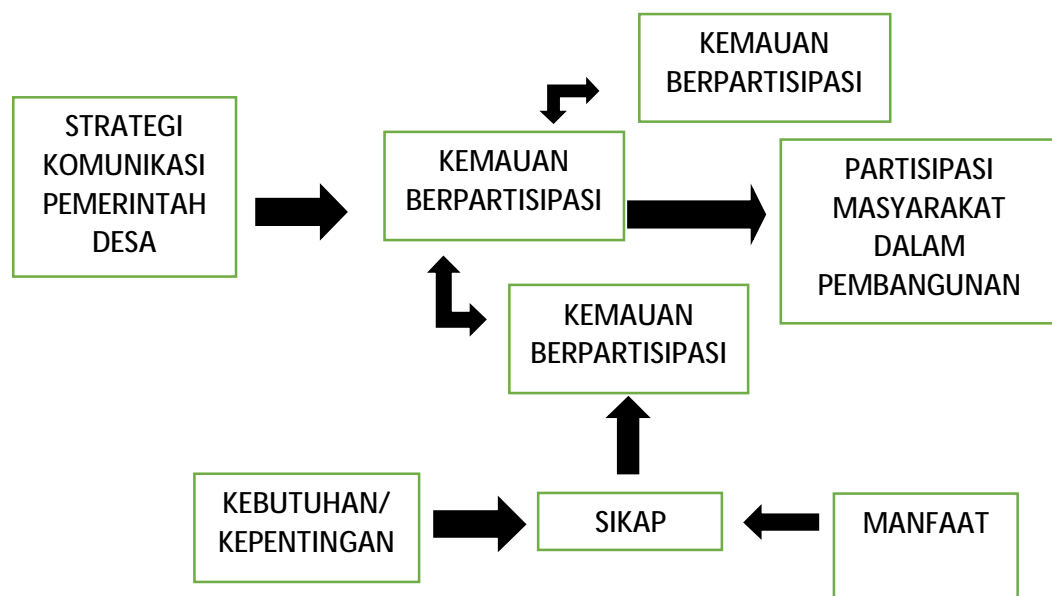
Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai peristiwa realitas yang tengah terjadi di masyarakat, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun peristiwa tertentu (Bungin, 2006: 68).

2. Kerangka Konsep

Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar dari argumentasi dalam menyusun kerangka konsep atau kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka konsep atau kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap kriteria utama agar suatu kerangka konsep bisa meyakinkan sesama alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berfikir yang membuahkan kesimpulan atau hipotesis, Sugiyono (2010:60).

Kerangka konsep adalah sebuah kerangka berfikir yang dijadikan sebagai landasan dalam momentum perspektif penelitian. Kerangka konsep merupakan hasil pemikiran yang bersifat kritis dalam memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang akan dicapai. Kerangka konsep disusun sebagai perkiraan teoritis dan yang akan dicapai setelah analisa secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki, (Nawawi 2005: 43). Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini yaitu menggambarkan melalui bagan sebagai berikut:

Gambar 3.1.
Kerangka Konsep



3. Defenisi Konsep

Konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah di kelompokkan ke dalam variable agar lebih terarah. Jadi, jelasnya defenisi konsep dimaksudkan untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan prilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

1. Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.

2. Strategi adalah seni dimana melibatkan kemampuan inteligensi/pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien.
3. Strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dalam semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.
4. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri tetapi juga menurut keterlibatan masyarakat yang akan memperbaiki mutu hidupnya.
5. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bagian atau subsistem dari system penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan perwakilan desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada Bupati.
6. BPD merupakan lembaga perwakilan rakyat ditingkat desa yang mewakili kedudukan setara dengan kepala desa. BPD menjadi mitra

kerja kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan setempat. BPD berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan atas kinerja kepala desa dan perangkat desa.

4. Kategorisasi Penelitian

Adapun yang menjadi kategorisasi penelitian bertujuan agar arah riset penelitian tidak lari dari latar belakang dan perumusan masalah penulis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Kategorisasi Penelitian

No.	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1	<p style="text-align: center;">Strategi Komunikasi Pemerintah Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi visi dan misi • Menentukan program dan kegiatan • Menentukan tujuan dan hasil • Mengembangkan pesan • Mekanisme komunikasi/media
2	<p style="text-align: center;">Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesadaran • Memberikan masukan dan kritik • Memenuhi kewajiban • Menjaga dan melestarikan • Menggunakan hak sebagai warga desa

5. Narasumber Penelitian

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah 7 (Tujuh) orang, antara lain sebagai berikut :

- a) Kepala Desa Batahan : Samwel Lubis
- b) Sekretaris Desa Batahan : Padolan Lubis
- c) Ketua Organisasi Kemasyarakatan : M. Yunan Nasution
- d) Ketua Organisasi Pembangunan : Alimin Lubis
- e) Ketua Organisasi Pemerintahan : Erdan Lubis

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Arikunto (2010:20) mengatakan agar penelitian dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 cara yakni :

1) Data Primer

Pengumpulan data yang diperoleh dari responden (objek penelitian) untuk memperoleh fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, data ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi.

2) Data sekunder

Data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan.

7. Teknik Analisis Data

Penganalisaan data kualitatif diawali dengan analisis berbagai data yang berhasil dihimpun dari lapangan penelitian. Data tersebut dikumpulkan baik melalui observasi, wawancara mendalam (*indept interview*) maupun berupa dokumen-dokumen penting yang mendukung penelitian. Keseluruhan data diklasifikasikan kedalam beberapa kategori-kategori tertentu.

Pengklasifikasian data ini dengan mempertimbangkan kemurnian/kebenaran data (kevalidtan), dengan senantiasa memperhatikan kompetensi subjek penelitian dan tingkat autentitasnya (Kriyantono, 2009:194).

Dalam penelitian analisis data dan pengolahan data sebagai berikut :

- a. Penyeleksian data, pemeriksaan kelengkapan dan kesempurnaan data serta kejelasan data.
- b. Reduksi data/pembentukan abstraksi dengan data yang ada seperti observasi, wawancara dan inti sari dokumen.
- c. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data dan dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya.
- d. Penyajian data melalui proses pencatatan, pengetikan, penyuntingan dan disusun kedalam bentuk teks yang diperluas.
- e. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

8. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Batahan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, pada hari Senin sampai Rabu, tanggal 27-29 Agustus 2018 pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.

b. Sejarah Kota Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal terletak berbatasan dengan Sumatera Barat. Bagian paling selatan dari Propinsi Sumatera Utara, Penduduk asli Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari dua etnis, yaitu masyarakat etnis Mandailing dan masyarakat etnis Pesisir Masyarakat Mandailing Natal terdiri dari suku/etnis Mandailing, Minang, Jawa, Batak, Nias, Melayu dan Aceh, namun etnis mayoritas adalah etnis Mandailing 80,00 %, etnis Melayu pesisir 7,00% dan etnis jawa 6,00%. Etnis Mandailing sebahagian besar mendiami daerah Mandailing, sedangkan etnis melayu dan minang mendiami daerah Pantai Barat.

Seperti halnya kebanyakan daerah-daerah lain, pada zaman dahulu penduduk Mandailing hidup dalam satu kelompok-kelompok, yang dipimpin oleh raja yang bertempat tinggal di Bagas Godang. Dalam mengatur sistem kehidupan, masyarakat Mandailing Natal menggunakan sistem DalianNaTolu (tiga tumpuan). Artinya, mereka terdiri dari kelompok kekerabatan Mora (kelompok kerabat pemberi anak dara), Kahanggi (kelompok kerabat yang satu marga) dan Anak Boru (kelompok kerabat penerima anak dara). Yang menjadi pimpinan kelompok tersebut biasanya adalah anggota keluarga dekat dari Raja yang menjadi kepala pemerintahan di negeri atau Huta asal mereka.

Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian, setelah terjadi pemekaran dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999. Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Mandailing Natal adalah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, pada saat berdirinya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yaitu :

- Kecamatan Siabu
- Kecamatan Panyabungan
- Kecamatan Kotanopan
- Kecamatan Muarasipongi
- Kecamatan Batang Natal
- Kecamatan Natal
- Kecamatan Batahan
- Kecamatan Muara Batang Gadis;

Melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2002 kedelapan Kecamatan induk dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan. Akhirnya jumlah kecamatan yang ada menjadi 17 (tujuh belas) kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

- Kecamatan Bukit Malintang
- Kecamatan Panyabungan Utara
- Kecamatan Panyabungan Timur
- Kecamatan Panyabungan Selatan

- Kecamatan Panyabungan Barat
- Kecamatan Lembah Sorik Marapi
- Kecamatan Tambangan
- Kecamatan Ulu Pungkut
- Kecamatan Lingga Bayu

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2007 kembali melakukan pemekaran kecamatan baru, yaitu :

- Kecamatan Ranto Baek
- Kecamatan Huta Bargot
- Kecamatan Puncak Sorik Marapi
- Kecamatan Pakantan
- Kecamatan Sinunukan;

Kemudian Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kembali membentuk Kecamatan Naga Juang, Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Malintang dengan menerbitkan Perda Nomor 49 Tahun 2007, sehingga sejak berdirinya Kabupaten Mandailing Natal Tahun 1998 telah mengalami 3 (tiga) kali pemekaran, jumlah kecamatan yang ada saat itu sebanyak 23 kecamatan. Hal tersebut, dilakukan sebagai perwujudan keinginan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, untuk mewujudkan masyarakat Madina yang Madani sesuai dengan yang kita inginkan bersama.

c. Visi Dan Misi Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Kotanopan, Desa Betahan.

Visi

Visi Kabupaten Mandailing Natal 2011-2016 merupakan perwujudan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai Bupati Mandailing Natal periode 2011-2016. Untuk menciptakan keharmonisan dan sebagai perwujudan visi pada RPJP Kabupaten Mandailing Natal 2005-2025 maka dilakukan penerjemaahan visi kampanye Kepala Daerah terpilih kedalam RPJMD Kabupaten Mandailing Natal 2011-2016 sehingga dapat dirumuskan kerangka Visi Kabupaten Mandailing Natal 2011-2016 adalah :“Terwujudnya masyarakat Mandailing Natal yang religius, cerdas, sehat, maju dan sejahtera”

Misi

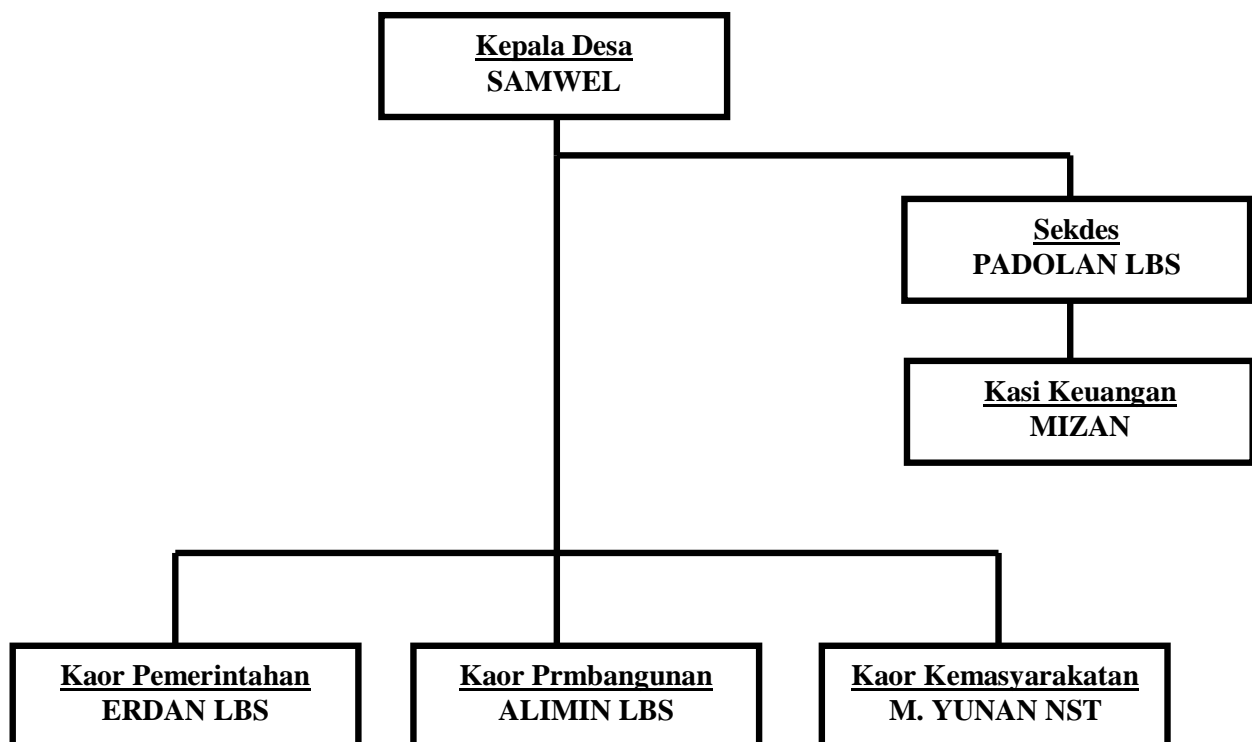
Untuk mewujudkan visi diatas, perlu dijabarkan melalui misi. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi dan memperhatikan misi kampanye Kepala Daerah terpilih. Adapun Misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan sosial
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, hukum, politik pembangunan dan pemerintahan
- Memberdayakan masyarakat dengan kearifan lokal

- Menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha yang didukung SDM dengan keterampilan berbasis karakteristik daerah dan pemerataan kesejahteraan

d. Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Batahan

Gambar 3.1.



Sumber : Kantor Kepala Desa Batahan 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Pada Bab ini, penulis akan menyajikan data dan deskripsi dari narasumber penelitian. Riset penelitian dilakukan di Desa Batahan , Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 pada pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai. Adapun nama-nama dari narasumber penelitian adalah sebagai berikut :

1. Informan pertama bernama Bapak Samwel, berusia 45 tahun. Beragama Islam. Menjabat sebagai Kepala Desa Batahan dan dan sudah bekerja selama 8 tahun.
2. Informan kedua bernama Bapak Padolan Lubis, dengan jenis kelamin laki-laki dengan usia 35 tahun, beragama islam dan sudah bekerja selama 8 tahun di kantor Kepala Desa Batahan sebagai Sekretaris
3. Informan ketiga bernama Bapak Alimin Lubis, dengan jenis kelamin laki-laki dengan usia 40 tahun, beragama islam dan sudah bekerja selama 8 tahun di kantor Kepala Desa Batahan sebagai Kepala Organisasi (Kaor) Pembangunan Desa Batahan.
4. Informan ke empat bernama Bapak M. Yunan Nasution, dengan jenis kelamin laki-laki dengan usia 45 tahun, beragama islam dan sudah bekerja selama 8 tahun di kantor Kepala Desa Batahan sebagai Kepala Organisasi (Kaor) Kemasyarakatan.

5. Informan kelima bernama Bapak Erdan Lubis, dengan jenis kelamin laki-laki dengan usia 41 tahun, beragama islam dan sudah bekerja selama 8 tahun di kantor Kepala Desa Batahan sebagai Kepala Organisasi (Kaor) Pemerintahan.

B. Hasil Penelitian

B.1. Strategi Komunikasi Pemerintahan Desa

Menurut seluruh narasumber, visi dari pembangunan di Desa Batahan adalah mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakatnya. Sedangkan misinya adalah meningkatkan akses pendidikan, kemudian meningkatkan pelayanan sosial dan memberdayakan masyarakat dengan kearifan lokalnya. Sampai sejauh ini visi dan misi ini sudah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal dikarenakan seperti yang diketahui akses jalan menuju ke Desa Batahan masih sulit. Kemudian kendala dalam melaksanakan visi dan misi tersebut adalah akses jalan yang masih sulit untuk sampai ke Desa Batahan dan akses kendaraan umum juga yang tidak ada serta masih dalam proses pembangunan. Namun sampai sejauh ini visi dan misi dari pembangunan Desa sudah hampir berjalan dengan lancar. Dapat dibuktikan dengan sudah adanya pembangunan yang terealisasi.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan bersosialisasi kerumah-rumah masyarakat serta mengadakan musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk membentuk jadwal-jadwal perhari masyarakat yang akan membantu pembangunan Desa batahan. Agar partisipasi berjalan baik, bahwa strategi yang mereka lakukan ialah tidak membenarkan setiap warganya bekerja setiap hari dalam pembangunan Desa

Batahan, melainkan berganti-ganti hari. Dengan begitu, warga tidak akan merasa terbebani dan juga dapat beristirahat. Kemudian, Program kerja yang sedang terlaksana adalah membuka isolasi daerah terpencil melalui pembangunan infratraktur pedesaan, meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan dan lain sebagainya serta program yang sedang prioritas dilaksanakan adalah pembangunan jalan dan jembatan-jembatan yang sudah rusak serta meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di puskesmas agar masyarakat desa tidak perlu jauh ke Kota untuk berobat. Untuk masalah strategi yang dilakukan agar program tersebut berjalan dengan lancar, narasumber mengatakan selalu melibatkan masyarakat disetiap pelaksanaannya. Sampai saat ini, program dan kegiatan sudah mencapai tujuan yang direncanakan, namun belum pada tahap maksimal. Hal ini dikarenakan perlu waktu dan dana yang tidak sedikit di setiap program pembangunannya.

Ketika ditanya jika hasil tidak sampai dengan hasil maksimal dalam pembangunan Desa, para narasumber mengatakan jika mereka akan tetap giat berusaha sampai batas kemampuan mereka. Untuk cara berkomunikasi dengan masyarakat Desa, biasanya sebelum melakukan pembangunan Desa, biasanya mereka sering keliling dan ikut bergabung dengan masyarakat yang sedang berkumpul, bersosialisasi dan menceritakan bagaimana jika Desa ini lebih baik lagi dari segi kesehatan, pelayanan sosial, kecerdasan dan lain sebagainya. Kemudian selalu menciptakan suasana yang kondusif dengan masyarakat. Menerima saran dan kritikan masyarakat terkait pembangunan yang akan terlaksana serta mengutamakan persetujuan dari masyarakat dalam hal

pembangunan. Jika hasil pembangunan tidak sampai pada target yang telah ditentukan, maka upaya yang mereka lakukan adalah sesegera mungkin menyelesaikan apa yang sudah berjalan terlebih dahulu sampai prosesnya siap secara utuh dan tidak setengah-setengah.

Untuk berkomunikasi dengan masyarakat, strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa adalah dengan selalu menciptakan suasana yang kondusif dengan masyarakat. Menerima saran dan kritikan masyarakat terkait pembangunan yang akan terlaksana. Komunikasi yang digunakan biasanya komunikasi yang bersifat langsung dan non formal. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan dan jarak antara masyarakat dengan pegawai Kantor Desa. Serta melakukan komunikasi yang biasanya bersifat musyawarah dibalai desa dengan komunikasi yang sederhana dan mudah untuk dimengerti.

Sampai sejauh ini, media yang digunakan unuk memberi informasi seputar pembangunan jalan hanya dengan spanduk-spanduk yang di letak di tempat-tempat tertentu saja seperti pingir jalan, dekan perkampungan warga dan sebagainya. Menurut Bapak Pardolon Lubis, media berperan penting dalam hal pembangunan desa, seperti memberikan informasi kepada masyarakat, untuk akses jalan dapat melewati jalur alternatif dan lain sebagainya. Kemudian, alasan memilih media cetak seperti spanduk adalah dikarenakan media ini dapat langsung dibaca oleh masyarakat sekitar yang sedang melintas melewati area pembangunan serta tidak memungkinkan memakai media *smartphone* dikarenakan untuk para orang tua di sekitar Desa Batahan masih banyak yang

belum memakai atau mempunyai *smartphone* tersebut. tetapi terkadang media juga meliput proses pembangunan tersebut.

B.2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan Desa, Pemerintahan Desa selalu melibatkan warga dalam proses pembangunannya serta memfasilitasi sarana dan prasarana dalam proses pembangunan. Kemudian, selalu melibatkan warga dalam musyawarah-musyawarah yang terkait dengan pembangunan Desa. Beliau juga mengatakan bahwa mereka selalu menerima masukan dan kritikan dari warga sekitar tempat area pembangunan akan terlaksana. Selain itu, melakukan sosialisasi dengan warga-warga, memberi pengetahuan baru serta mengajak masyarakat untuk melihat langsung kondisi Desa dan cara pembangunannya.

Pemberian pengetahuan akan dampak buruk jika pembangunan tidak dilaksanakan. Seperti, jika jembatan tidak di renovasi, maka akan memakan banyak korban. Begitu juga dengan klinik-klinik dan puskesmas. Kemudian barulah bersama mengajak para masyarakat untuk ikut serta dalam membantu proses pembangunan tersebut. Agar semangat partisipasi tidak menurun, hal yang dilakukan adalah dengan selalu menerima kritikan, saran dan keluhan dari masyarakat desa. Keterlibatan para pegawai Pemerintahan Desa akan ikut serta membantu dalam proses pembangunan. Dengan ini, harapannya masyarakat juga akan ikut serta. Jadi, tidak hanya sekedar memberikan sosialisasi saja, tetapi ikut serta juga dalam prosesnya. Sementara upaya yang terus dilakukan agar

partisipasi masyarakat desa tidak menurut, biasanya selalu sosialisasi terus kepada masyarakat.

Pemerintahan Desa selalu membuka dan menerima kritikan dan saran dari masyarakat Desa Batahan. Adapun saran dari masyarakat Batahan adalah agar fasilitas pelayanan sosial seperti kelengkapan puskesmas, posyandu dan lain sebagainya agar masyarakat tidak harus ke Kota, dikarenakan perjalanan yang jauh dan akses jalan yang tidak baik. Kemudian, masyarakat Desa juga berharap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang pertanian maupun perkebunan. Selain itu, kondisi jalanan desa yang masih buruk seperti belum di aspal dan jalan berbatu, sehingga sangat sulit bagi yang berkendara. Angkutan untuk masuk kedalam desa juga tidak ada, sehingga jika yang ingin melakukan perjalanan ke luar desa harus mempunyai kendaraan sendiri atau menumpang kepada orang lain atau dengan ojek-ojek saja. Adapun kritikan dari warga desa adalah agar proses tersebut tidak memakan waktu yang lama agar dapat segera merasakan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat desa.

Bicara soal kewajiban masyarakat desa, perkembangan sampai sejauh ini masyarakat Desa Batahan sudah banyak membantu dalam pembangunan Desa. Masyarakat juga berusaha untuk melestarikan Desa dengan membuatnya jadi lebih asri seperti menanam tanaman dan tumbuhan, mengelola ladang dengan rapi dan baik. Masyarakat desa juga selalu rutin bergotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan serta saling membantu ketika ada warga yang sedang membutuhkan pertolongan.

C. Pembahasan Data

Dari hasil seluruh jawaban narasumber yakni pegawai Pemerintahan Desa Batahan yang berjumlah lima orang, maka dilakukan pembahasan data sebagai berikut :

Visi dari Pemerintahan Desa dalam pembangunan Desa Batahan adalah “Mensejahterakan Dan Mencerdaskan masyarakat Desa Batahan serta Terwujudnya masyarakat Mandailing Natal yang religius, cerdas, sehat, maju dan sejahtera”. Kemudian Misi dari Pemerintahan Desa dalam pembangunan Desa Batahan adalah meningkatkan akses pendidikan, Meningkatkan pelayanan sosial, membangun infrastruktur pembangunan serta meningkatkan Sumber Daya masyarakat dan kearifan lokalnya. Pada penerapannya visi dan misi ini sudah 50% berjalan dan terlaksana. Sisanya masih dalam program yang akan direalisasikan.

Program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Batahan adalah perbaikan akses jalan menuju ke Desa Batahan. Hal ini dilakukan dikarenakan kondisi jalan yang sudah rusak yang mengakibatkan masyarakat Desa Batahan sulit untuk keluar dari Desa. Alasan lainnya adalah agar masyarakat luar dari Desa Batahan yang ingin datang untuk keperluan tertentu tidak sulit untuk memakai akses jalan. Kemudian program yang sudah terealisasi adalah pelayanan sosial seperti puskesmas dan klinik-klinik yang sudah mempunyai dokter dan obat-obatan yang tersedia lengkap. Sehingga masyarakat Desa Batahan tidak perlu keluar jauh untuk berobat. Agar program pembangunan akses jalan berjalan dengan baik, strategi yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa adalah

melakukan sosialisasi dengan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan dan musyawarah serta ikut serta dalam proses pembangunan.

Tujuan dan hasil yang sudah didapat dari pembangunan Desa Batahan adalah akses jalan yang sudah dapat dipergunakan sebagian serta jembatan penghubung yang sudah siap. Namun belum sampai pada hasil yang maksimal. Masih ada pembangunan lain yang harus di realiasi dan membutuhkan waktu yang tidak cepat dalam prosesnya. Kemudian, ketika program tidak dapat terealisasi dengan maksimal, Pemerintahan Desa khususnya Desa Batahan akan berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan pembangunan yang sedang berjalan sampai selesai.

Strategi komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat menggunakan komunikasi langsung seperti musyawarah dibalai desa dan sosialisasi. Hal-hal yang dibahas serta dikomunikasikan seputar rencana pembangunan dan partisipasi masyarakat kepada program tersebut. agar proses pembangunan dapat berjalan dengan cepat. Komunikasi yang terjadi juga bersifat langsung dan santai, tidak terlalu formal, lebih kepada komunikasi non formal. Hal ini bertujuan agar masyarakat paham dan mudah mengerti maksud dari pembanguan tersebut.

Media komunikasi yang dilakukana untuk meningkatkan partisipasi dan memberikan informasi seputar pembangunan akses jalan, Pemerintahan Desa Batahan menggunakan media cetak yakni spanduk yang dipasang di sekitaran Desa Batahan dan jalanan menuju Desa Batahan dan area yang sedang dalam proses pembangunan. Alasan mengapa Pemerintahan Desa memilih spanduk adalah mudah dibaca dan bisa dipasang dimana saja sehingga informasi yang

diberikan juga dapat dibaca berulang-ulang serta masih banyaknya masyarakat yang belum memakai media sosial, sehingga media cetak lebih dianggap efisien.

Sampai sejauh ini masyarakat Desa Batahan sudah memenuhi kewajibannya menjadi warga Desa Batahan. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi mereka dalam proses pembangunan akses jalan di Desa Batahan. Tingkat kepedulian dengan lingkungan Desa Batahan juga sangat baik. Sebagian dari masyarakat Desa Batahan berladang dan menanam tanaman dengan asri dan rapi. Masyarakat Desa Batahan juga sering bergotong royong untuk membersihkan lingkungan mereka.

Masyarakat Desa Batahan sudah menggunakan hak sebagai warga Desa dengan baik, maka timbal balik yang mereka dapat adalah pembangunan Desa Batahan menjadi Desa yang lebih baik dan maju lagi dari segi akses jalan, pendidikan, pelayanan sosial, sumber daya manusia, sumber daya alamnya dan lain sebagainya. Untuk meyakinkan itu Pemerintah Desa melaksanakan pembangunan dengan proses bertahap untuk kemajuan Desa Batahan, Kabupaten Mandailing Natal.

Konsep Pemerintahan dan pembangunan desa yang dipakai oleh Desa Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah konsep kewenangan otonomi, dimana keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya (yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000). Disamping itu keluasaan otonomi

mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Kemudian otonomi nyata pada Desa Batahan juga sudah dapat dilihat dan terealisasi meskipun belum seratu persen maksimal. Hal dapat diketahui dari keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang didaerah. Pemerintah daerah selain berperan melindungi masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat juga harus mampu mengelola berbagai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepadanya. Dalam pengelolaan kewenangan yang luas tersebut tetap dibatasi rambu penting dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi nyata yang dapat terlihat adalah peran pemerintahan desa dalam berusaha membangun Desa Batahan yakni program yang sudah terealisasikan, melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya serta selalu berdiskusi dan menerima kritikan dan masukan dari masyarakat Desa Batahan untuk kemajuan desa tersebut. Dalam hal ini, otonomi bukanlah semata-mata menggunakan pendekatan administratif atau sekedar meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja saja, akan tetapi sekaligus pendekatan dalam dimensi politik. Dengan demikian, makna kewenangan dibidang pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sejauh mungkin harus dapat dilayani secara dekat dan cepat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan riset penelitian dan pembahasan data pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari hasil penelitian dari “Strategi Komunikasi Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Batahan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal”, adalah sebagai berikut :

- 1 Visi dari Pemerintahan Desa dalam pembangunan Desa Batahan adalah “Mensejahterakan Dan Mencerdaskan masyarakat Desa Batahan serta Terwujudnya masyarakat Mandailing Natal yang religius, cerdas, sehat, maju dan sejahtera”.”. Kemudian Misi dari Pemerintahan Desan dalam pembangunan Desa Batahan adalah meningkatkan akses pendidikan, Meningkatkan pelayanan sosial, membangun infrastruktur pembangunan serta meningkatkan Sumber Daya masyarakat dan kearifan lokalnya.
- 2 Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Batahan dalam melakukan pembangunan desa adalah membuka isolasi daerah terpencil melalui pembangunan infratraktur pedesaan, meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan dan lain sebagainya serta program yang sedang prioritas dilaksanakan adalah pembangunan jalan dan jembatan-jembatan yang sudah rusak serta meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada

di puskesmas agar masyarakat desa tidak perlu jauh ke Kota untuk berobat dan aktifitas lainnya.

- 3 Tujuan dan hasil dari pembangunan Desa Batahan ini adalah akses jalan yang sudah dapat dipergunakan sebagian serta jembatan penghubung yang sudah siap. Namun belum sampai pada hasil yang maksimal. Masih ada pembangunan lain yang harus di realisasi dan membutuhkan waktu yang tidak cepat dalam prosesnya.
- 4 Strategi komunikasi yang dilakukan Pemerintahan desa dalam berkomunikasi dengan masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi kerumah-rumah masyarakat Desa Batahan untuk memberikan informasi seputar pembangunan akses jalan, mengadakan musyawarah di Balai Desa, menerima saran dan kritik dari masyarakat, memasang spanduk-spanduk dipinggir jalan dan sekitar perumahan masyarakat Desa Batahan melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan dengan masyarakat Desa Batahan.
- 5 Audience yang terlibat dalam strategi komunikasi Pemerintahan Desa ini adalah pejabat Pemerintahan daerah dan masyarakat dalam berpartisipasi guna mempercepat proses pembangunan Desa Batahan tersebut.
- 6 Mekanisme komunikasi/media yang digunakan dalam perkembangan informasi pembangunan Desa Batahan adalah memberikan informasi seputar pembangunan akses jalan, Pemerintahan Desa Batahan menggunakan media cetak yakni spanduk yang dipasang di sekitaran Desa Batahan dan jalanan menuju Desa Batahan dan area yang sedang dalam

proses pembangunan. Alasan mengapa Pemerintahan Desa memilih spanduk adalah mudah dibaca dan bisa dipasang dimana saja sehingga informasi yang diberikan juga dapat dibaca berulang-ulang serta masih banyaknya masyarakat yang belum memakai media sosial, sehingga media cetak lebih dianggap efisien.

- 7 Cara yang dilakukan Pemerintahan desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam pembangunan desa adalah Pemerintahan Desa selalu melibatkan warga dalam proses pembangunannya serta memfasilitasi sarana dan prasarana dalam proses pembangunan. Kemudian, selalu melibatkan warga dalam musyawarah-musyawarah yang terkait dengan pembangunan Desa. Beliau juga mengatakan bahwa mereka selalu menerima masukan dan kritikan dari warga sekitar tempat area pembangunan akan terlaksana. Selain itu, melakukan sosialisasi dengan warga-warga, memberi pengetahuan baru serta mengajak masyarakat untuk melihat langsung kondisi Desa dan cara pembangunannya.
- 8 Adapun saran dari masyarakat Batahan adalah agar fasilitas pelayanan sosial seperti kelengkapan puskesmas, posyandu dan lain sebagainya agar masyarakat tidak harus ke Kota, dikarenakan perjalanan yang jauh dan akses jalan yang tidak baik. Kemudian, masyarakat Desa juga berharap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang pertanian maupun perkebunan. Selain itu, kondisi jalanan desa yang masih buruk seperti belum di aspal dan jalan berbatu, sehingga sangat sulit bagi

yang berkendara. Angkutan untuk masuk kedalam desa juga tidak ada, sehingga jika yang ingin melakukan perjalanan ke luar desa harus mempunyai kendaraan sendiri atau menumpang kepada orang lain atau dengan ojek-ojek saja. Adapun kritikan dari warga desa adalah agar proses tersebut tidak memakan waktu yang lama agar dapat segera merasakan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat desa.

- 9 Hak dan kewajiban masyarakat Desa Batahan juga dapat dilihat dari Sampai sejauh ini masyarakat Desa Batahan sudah memenuhi kewajibannya menjadi warga Desa Batahan. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi mereka dalam proses pembangunan akses jalan di Desa Batahan. Tingkat kepedulian dengan lingkungan Desa Batahan juga sangat baik. Sebagian dari masyarakat Desa Batahan berladang dan menanam tanaman dengan asri dan rapi. Masyarakat Desa Batahan juga sering bergotong royong untuk membersihkan lingkungan mereka.
- 10 Masyarakat Desa batahan juga sudah menjaga kelestarian desanya dengan baik. Dapat dilihat kekeluargaan masyarakat desa dalam bergotong royong untuk selalu membersihkan desa Batahan serta semangat untuk membantu proses pembangunan Desa Batahan. Hak dan kewajiban juga sudah dilaksanakan dengan baik. Masukan-masukan dari masyarakat sudah di realisasikan oleh Pemerintahan Desa serta masyarakat desa juga sudah membantu perkembangan, kelestarian serta bergotong royong.
- 11 Konsep pemerintahan dan pembangunan desa yang dipakai adalah konsep kewenangan otonomi, dimana keleluasaan daerah untuk

menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya. Otonomi nyata yang dapat terlihat adalah peran pemerintahan desa dalam berusaha membangun Desa Batahan yakni program yang sudah terealisasi, melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya serta selalu berdiskusi dan menerima kritikan dan masukan dari masyarakat Desa Batahan untuk kemajuan desa tersebut.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan, maka beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Diharapkan Pemerintahan Desa Batahan lebih mempercepat proses pembangunan agar masyarakat dapat menggunakan akses jalan dengan lebih baik lagi
- 2 Diharapkan Pemerintahan Desa melakukan penyebaran angket atau bertanya kepada masyarakat apakah mereka sudah merasa puas dengan pembangunan yang dilaksanakan.
- 3 Diharapkan Pemerintahan Desa melakukan observasi dan melakukan pembangunan dengan lengkap seperti dengan menambahkan lampu jalan untuk malam hari dan angkutan umum yang masuk melewati Desa Batahan agar akses perjalanan masyarakat jadi lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon. 2011. *Managemen Strategi Untuk Strategi Pendidikan*, Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Apriadi, Tamburaka. 2013. *Literasi Media : Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Basu, Swastha. 2007. *Managemen Pemasaran Modern, Edisi IX*. Yogyakarta : Liberty.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo
- Cangara, Hafied. 2014. *Pengantar Komunikasi*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- , 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Daryanto. 2010. *Ilmu Komunikasi*. Bandung. PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
- Effendy, Onong, Uchjana. 2011. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- , 2005. *Dinamika Komunikasi Jilid III*, Bandung:Remaja Rosdakarya.
- , 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung Citra Aditya Bakti
- Kriyantono, Rakhmat, 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta. Kencana Pramedia Media Group
- Liliweri, Alo, 2011 : *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, Jakarta : Kharisma Putra Utama
- Mardikanto & Soebiato. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perfektif Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung. Alfabeta.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Survei, Edisi Revisi*. Yogyakarta. Liberty.

Salusu, J. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*, Jakarta. Grasindo

Soeprapto, Tommy. 2011. *Pengantar Ilmu Komunikasi Dan Peran Manajemen Dalam Komunikasi*, Jakarta. PT. Buku Seru.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung. Penerbit Alfabeta.

----- . 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Bandung. Alfabeta

Theresia, Andiri, dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akedemini, Dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, Bandung. Alfabeta.